

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN DAIRI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan tahapan yang sangat penting dilaksanakan setiap SKPD untuk mengarahkan tujuan serta sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Renja Dinas Sosial Kabupten Dairi Tahun 2025 ini berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan untuk penyempurnaan sehingga akhirnya Renja yang akan tersusun dapat menjawab permasalahan baik permasalahan pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi maupun permasalahan daerah secara keseluruhan.

Atas tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Dairi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparaturnya Dinas Sosial Kabupaten Dairi yang telah banyak memberikan bantuan dan semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidikalang,

2024

KEPALA DINAS SOSIAL,

AGEL SIREGAR S.ST., M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19770415 200212 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025, Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 - 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Dairi
3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Daerah
4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4a67);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 07 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Dairi tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Dairi yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025;
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra;
3. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ;
4. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial;
5. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Sosial Kabupaten Dairi yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dan penelaahan usulan program masyarakat.

- BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan dari Dinas Sosial.
- BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V Penutup, menguraikan kesimpulan dari tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2023 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. **7.774.971.390,-** dengan capaian realisasi sebesar Rp. **7.029.052.061,- (90,40%)**.

Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra Dinas Sosial Kabupaten Dairi adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 61,15% dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya sebesar 100 %. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2023

:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023
Kabupaten Dairi

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar								
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai peraturan dan tepat waktu								
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	21 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100	7 laporan	21 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 org/bln	21 org/bln	21 org/bln	21 org/bln	100	21 org/bln	21 org/bln	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan								
	Sub kegiatan:									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	45 paket	13 paket	12 Bln (13 paket)	12 Bln (13 paket)	100	2 paket	17 Paket	0
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Disediakan								
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	24 paket	12 Bln (8 paket)	12 Bln (8 paket)	12 Bln (8 paket)	100	8 paket	24 paket	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	504 dok	12 Bln (168 paket)	12 Bln (168 paket)	12 Bln (168 paket)	100	12 Bln (168 paket)	504 dok	0
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 laporan	210 laporan	12 Bln (210 laporan)	12 Bln (210 laporan)	100	210 laporan	630 laporan	0
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentaase pemenuhan sarana dan prasarana								
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 unit	9 Unit	10 unit	10 unit	100	0	19 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Disediakan								
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
	Sub Kegiatan:									
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	12 Bln (24 laporan)	12 Bln (24 laporan)	12 Bln (24 laporan)	100	24 laporan	36 laporan	0
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81 laporan	27 laporan	12 Bln (27 laporan)	12 Bln (27 laporan)	100	27 laporan	81 laporan	0
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18 laporan	6 Orang	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	18 laporan	
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	12 Bln (3 unit)	12 Bln (3 unit)	12 Bln (3 unit)	100	3 unit	9 unit	
	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	12 Bln (2 unit)	12 Bln (2 unit)	12 bln (2 unit)	100	2 unit	6 unit	
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan pendampingan								
	Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota									
	Sub Kegiatan:									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	45 orang	15 orang	15 org	15 org	100	15 orang	45 org	0
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	150 keluarga	100 Org	0	0	0	0	100 Org	0
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	45 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100	2 lembaga	6 lembaga	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota		15 kec	0	0	0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS (Penyandang, Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia, gelandangan dan pengemis)								
	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial									
	Sub Kegiatan:									
	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten / kota						20 org		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten / kota						50 orang		
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	75 orang	55 orang				55 Org		0
	Pemberian Bimbingan fisik, mental, spritual dan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	300 orang	100 Org	100 Org	100 Org	100	150 Org	350 Org	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	60 orang	56 org	20 org	20 org	100%	25 Org	76 org	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten / kota						20 org		
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial								
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan:									
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	390.567 keluarga	169 Desa/Kel	16.525 keluarga	57.435 kk		130.189 keluarga		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	1.964 keluarga	1200 keluarga	1200 keluarga	1200 keluarga	100%	1000 keluarga	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan								
	Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota									
	Sub Kegiatan:									
	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	200 orang		2000 org	889 org	44,45%	100 org	0	0
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat	200 orang	-	0	0	0	100 org	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA-SKPD Tahun 2023	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		(pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota								
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-						
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	66 orang	22 orang	22 org	22 org	100	22 org		0

Sidikalang,

2024

KEPALA DINAS SOSIAL,

AGEL SIREGAR, S.ST., M.AP
 APEMBINA TK. I
 NIP. 19770415 200212 1 004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Dairi sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Persentase penanganan PPKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 sebesar 61.15%, Jumlah PPKS yang ditangani pada Tahun 2023 sebanyak 203.195 Jiwa dari jumlah Penduduk di Kabupaten Dairi sebanyak 332.262 jiwa, sementara untuk Program Penanganan Bencana dengan Sasaran Indikator berupa Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten\kota sebesar 100 %. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial baik Tujuan maupun Sasaran sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Dairi

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	Urusan Sosial													
	Persentase PPKS			0	0	59,08%	58,80%	58,52%	0	0	63,52%	61,15%		
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			0	0	100%	100%	100%	0	0	71%	100%		
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

IGOR Ansoff (1980) memberikan pengertian tentang isu strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Adapun menurut Jane Dutton (1980), Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Dairi, telaah RPD Kabupaten Dairi, telaah RPD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, telaah kebijakan nasional dan telaah atas saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan, yang meliputi meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan masih harus terus dilakukan sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai yaitu *reduce poverty and zero hungry*

b. Kekerasan seksual

Maraknya kekerasan yang terjadi pada anak baik kekerasan fisik, psikis dan seksual dengan pelaku keluarga inti, tetangga dan masyarakat sekitar

c. Pemberdayaan sosial

Pelaksanaan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri

Validasi dan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial untuk penyelenggaran kesejahteraan sosial yang tepat sasaran;

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Dairi

Nama SKPD : Dinas Sosial

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten /Kota	Dinas Sosial	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten /Kota				3.581.599.432,-	
1.06.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai peraturan dan tepat waktu		10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat				10.390.000	

1.06.01.2.0 1.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	10.390.000	
1.06.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan		2.500.000.000,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.503.375.076,-	
1.06.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.500.000.000,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.503.375.076,-	
1.06.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5 orang	100.000.000,-					52.568.000,-	
1.06.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas Sosial	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	100.000.000,-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas Sosial	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	52.568.000,-	
1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan			Administrasi Umum Perangkat Daerah				491.000.000,-	

1.06.01.2.0 6.01	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan	Dinas Sosial	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan	Dinas Sosial	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	8.219.000	
1.06.01.2.0 6.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	85.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	88.380.740	
1.06.01.2.0 6.05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	22.047.000	
1.06.01.2.0 6.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Dokumen	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Dokumen	0	
1.06.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	240 Laporan	350.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	240 Laporan	348.620.000	
1.06.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		200.000.000,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				228.369.340,-	

1.06.01.1.0 7.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	200.000.000,-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	228.369.340,-	
1.06.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.405.888,-	
1.06.01.2.0 8.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	5.000.000,-	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	4.000.000,-	
1.06.01.2.0 8.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	30.000.000,-	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	27.000.000,-	
1.06.01.2.0 8.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	27 Laporan	20.000.000,-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	27 Laporan	19.120.000,-	
1.06.01.2.0 8.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Laporan	130.599.432,-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	183.285.888,-	

1.06.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				300.000.000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				365.815.472,-	
1.06.01.2.0 9.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Sosial	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	150.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Sosial	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	94.404.472,-	
1.06.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	271.412.000,-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Dinas Sosial	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0						
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				590.000.000,-	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				474.000.000,-	
1.06.02.2.0 1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				0	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				0	

1.06.02.2.0 1.02	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Kab. Dairi	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan social kewenangan kabupaten/kota	0	0	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Kab. Dairi	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan social kewenangan kabupaten/kota	0	0	
1.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota				590.000.000,-	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota				474.000.000,-	
1.06.02.2.0 3.02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Dinas Sosial	Jumlah tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	150.000.000,-	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Dinas Sosial	Jumlah tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	144.000.000,-	
1.06.02.2.0 3.03	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab.Dairi	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	150.000.000,-	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab.Dairi	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	80.000.000,-	
1.06.02.2.0 3.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab.Dairi	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	15 Lembaga	299.999.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab.Dairi	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	15 Lembaga	250.000.000,-	

1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial				860.000.000,-	Program Rehabilitasi Sosial				347.000.000,-	
1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Social Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				860.000.000,-	Rehabilitasi Social Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				347.000.000,-	
1.06.04.2.0 1.01	Pemyediaan Permakanan	Kab Dairi	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	150.000.000,-	Pemyediaan Permakanan	Kab Dairi	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	47.000.000,-	
1.06.04.2.0 1.02	Penyediaan Sandang	Kab Dairi	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0		Penyediaan Sandang	Kab Dairi	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	45.000.000,-	

1.06.04.2.0 1.03	Penyediaan Alat Bantu	Kab daira	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewengan kabupaten/kota	50 orang	200.000.000,-	Penyediaan Alat Bantu	Kab daira	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewengan kabupaten/kota	0	0	
1.06.04.2.0 1.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab daira	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental,spiritual, dan social kewengan kabupaten/kota	150 Orang	200.000.000,-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab daira	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental,spiritual, dan social kewengan kabupaten/kota	150 Orang	100.000.000,-	
1.06.04.2.0 1.07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu Indentitas Anak	Kab daira	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu indentitas anak bagi penyandang disabilitas kewenagan kabupaten/ kota	20 Orang	50.000.000,-	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu Indentitas Anak	Kab daira	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu indentitas anak bagi penyandang disabilitas kewenagan kabupaten/ kota	0	0	

1.06.04.2.0 1.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab daira	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	200.000.000,-	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab daira	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	155.000.000,-	
1.06.04.2.0 1.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab daira	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewengan kabupaten/kota	20 Orang	60.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab daira	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewengan kabupaten/kota	20 Orang	0	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.800.000.000,-	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2.415.581.000,-	
1.06.05.2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.800.000.000,-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.415.581.000,-	
1.06.05.2.0 2.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab daira	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	Keluarga	300.000.000	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab daira	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	Keluarga	167.000.000	

1.06.05.2.0 2.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Kab dairi	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewengan kabupate/kota	1000 Keluarga	1.500.000.000	Fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga	Kab dairi	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewengan kabupate/kota	0	2.248.581.000,-	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				280.000.000,-	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				255.600.000,-	
1.06.06.2.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota				100.000.000,-	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota					
1.06.06.2.0 1.01	Penyediaan makanan	Kab. Dairi	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	50.000.000,-	Penyediaan makanan	Kab. Dairi	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	0,-	

1.06.06.2.0 1.02	Penyediaan Sandang	Kab. Dairi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	50.000.000,-	Penyediaan Sandang	Kab. Dairi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	0,-	
1.06.06.2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				180.000.000,-	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				255.600.000,-	
1.06.06.2.0 2.02	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten /kota	22 Orang	180.000.000,-	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten /kota	22 Orang	255.600.000,-	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				150.000.000,-	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				50.000.000,-	

1.06.07.2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota				150.000.000,-	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota				50.000.000,-	
1.06.07.2.0 1.02	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	TMP Panji Sibura-bura	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1 Makam	150.000.000	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	TMP Panji Sibura-bura	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1 Makam	50.000.000	
	Jumlah				7.261.599.432,-					7.403.372.516	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang dihadiri oleh kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan LSM.

Tabel 2.12.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Dairi

No	Usulan	Volume / Satuan	Lokasi	Bidang Pembangunan			Perangkat Daerah Penanggung
				Infrastruktur	Ekonomi	Sosial Budaya	
1	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

Tujuan dan sasaran

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disesuaikan dengan telaahan sasaran dan tujuan RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026. Salah satu tujuan RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah **mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat** dengan salah satu sasarannya yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah **menurunnya tingkat kemiskinan**. Penurunan tingkat kemiskinan juga menjadi tujuan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan menjadi tujuan kebijakan nasional.

Kebijakan nasional dengan penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) berkaitan dengan urusan sosial dalam poin 1, 2, 10 dan 17, yaitu:

Poin pertama: no poverty: mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

Poin kedua: zero hunger: mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan

Poin sepuluh: reduced inequalities: mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah Negara maupun di antara negara-negara di dunia.

Poin ketujuhbelas: partnership for the goals: memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah Pusat untuk penerapan SDGs yang telah dimulai sejak 1 Januari 2016 harus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui program/kegiatan pada organisasi perangkat daerah masing-masing.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Dairi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi. Dari hasil penapisan yang

dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka Urusan Wajib Sosial tidak secara langsung berkaitan dengan RTRW/KLHS

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja baik pada dampak, hasil maupun keluar dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Dairi adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.2.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Dairi akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran “Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial”

sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Dairi sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2025 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Dairi pada Tahun 2025.

Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada Tahun 2025 sesuai dengan tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada Tahun 2025

Dinas Sosial Kabupaten Dairi

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET SASARAN
				2025
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	50,30%
2.			Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	59,95%
3.			Persentase korban bencana alam dan social tingkat kabupaten yang mendapatkan penanganannya pada saat bencana dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	100%

3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu dalam hal pembangunan daerah. Dinas Sosial Kabupaten Dairi menjalankan 1 urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar. Maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025 terdiri dari:

No	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
	Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			7.403.372.516,-			7.840.000.000,-	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			3.861.191.516,-			3.900.000.000,-	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah			10.390.000,			11.000.000	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		0	0	2 Dokumen	11.000.000,-	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		7 Laporan	10.390.000,-	7 Laporan	11,000,000	

1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				52.568.000			70.000.000,-
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Sosial	4 orang	52.568.000		4 orang	70.000.000,-
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.503.375.076,-			2.600.000.000
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial	21 Orang/bulan	2.503.375.076,-		21 Orang/bulan	2.600.000.000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				467.266.740,-			519.000.000
1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalansi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	2 Paket	8.219.000,-		2 Paket	22,000,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Sosial	2 Paket	88.380.740,-		2 Paket	87,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Sosial	1 Paket	22.047.000,-		1 Paket	22,000,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Sosial	20 Dokumen	0,-		20 Dokumen	18.000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	240 Laporan	348.620.000,-		250 Laporan	370,000,000,-

1	06	01	1.07		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				228.369.340,-		120.000.000
1	06	01	1.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Sosial	10 unit	228.369.340	10 unit	120.000.000
1	06	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				233.405.888,-		240.000.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			4.000.000.-		
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial	24 Laporan	27,000,000	24 Laporan	30,000,000
1	06	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	27 Laporan	19.120.000,-	27 Laporan	22.000.000,-
1	06	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	6 Laporan	183.285.888,-	6 Laporan	188.000.000,-
1	06	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan				365.816.472,-		340.000.000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial	2 unit	94.404.472,-	2 unit	170,000,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Sosial	2 Unit	271.412.000,-	2 unit	170.000,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				474.000.000,-		630.000.000,-

1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				474.000.000,-			630.000.000,-
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		15 orang	144.000.000,-		15 orang	160.000.000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	50 Keluarga	80.000.000,-		20 orang	170.000.000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab. Dairi	2 Lembaga	250.000.000,-		2 Lembaga	300.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				347.000.000,-			930.000.000,-
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				347.000.000,-			930.000.000,-
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Dairi	50 Org	47.000.000,-		50 Org	100.000.000,-
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	0	45.000.000.-		50 Org	100.000.000,-

1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /kota	Kab. Dairi	45 orang	0,-		60 orang	200,000,000,-
1	06	04	2.01	05	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	100 orang	100.000.000,-		200 orang	200,000,000,-
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewengan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	20 orang	0,-		25 Orang	60,000,000,-
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	25 Orang	155.000.000,-		25 Orang	200.000.000,-
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Dairi	20 Orang	0,-		25 Orang	70.000.000,-
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2.415.581.000,-			1.800.000.000,-
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.415.581.000,-			1.800.000.000,-
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	130.189 Keluarga	167.000.000,-		130.189 Keluarga	300.000.000,-

1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	1000 Keluarga	2.248.581.000,-		1000 Keluarga	1.500.000.000,-
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				255.60.000,-			410.000.000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				0,-			210.000.000
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Dairi	50 Orang	0,-		150 Orang	60.000.000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Dairi	50 Orang	0,-		150 Orang	150,000,000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				255.600.000,-			200.000.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	22 Orang	255.600.000,-		22 Orang	200,000,000

1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				50.000.000,-		170.000.000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				50.000.000,-		170.000.000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Panji Sibura bura	1 Makam	50.000.000,-	1 Makam	170,000,000
							Jumlah		7.403.372.516,-		7.840.000.000,-

Sidikalang,

2024



KEPALA DINAS SOSIAL,

AGEL SIREGAR, S.ST., M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19770415 200212 1 004

Bab V PENUTUP

Dokumen Renja menjadi elemen penting dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan karena dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Melihat pada sifatnya, Renja merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Hal ini ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja output dan outcome dari setiap kegiatan. Selain itu juga memuat tentang Pagu Indikatif yang mungkin dapat disediakan untuk melaksanakan kegiatan.

Semoga Renja tahun 2025 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Dairi. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Sidikalang,

2024



KEPALA DINAS SOSIAL,

AGEL SIREGAR, S.ST., M.AP
PEMBINA TK. I

NIP. 19770415 200212 1 004

